

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis hukum yang telah dilakukan Penulis, maka sampai pada kesimpulan sebagai berikut :

1. BPRN dalam melaksanakan fungsi pengawasan memiliki beberapa tahap yang pertama adalah BPRN melakukan tahap penyusunan. Dalam tahap penyusunan ,BPRN bersama pemerintah nagari mengunjungi masing-masing jorong dan terlibat ke dalam kegiatan musyawarah jorong yang dilaksanakan sebelum diadakannya musyawarah nagari. Kegiatan tersebut bertujuan untuk menampung semua aspirasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan Nagari. Setelah melakukan musyawarah di tingkat jorong BPRN bersama Pemerintah Nagari melakukan Musberang membahas apa saja yang diperlukan dalam Nagari Parambahan.kemudian tahap yang kedua adalah tahap pelaksanaan pengawasan yang dimana BPRN melakukan pengawasn langsung dan tidak langsung. Pengawasan langsung yang dimaksud adalah turun langsung kelapangan untuk mengawasi program program perencanaan Nagari apakah sesuai dengan yang sudah disepakati sedangkan pengawasan tidak langsung berupa BPRN melakukan penilaian laporan tertulis dari lembaga yang diawasi. Dalam melakukan fungsi pengawasannya BPRN tidak luput dari adanya faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung BPRN dalam melaksanakan fungsi pengawasannya dalam perencanaan pembangunan Nagari Parambahan

yaitu Partisipasi masyarakat sangat baik,dalam memberikan aspirasinya dalam perencanaan pembangunan dan adanya hubungan timbal balik antara BPRN dengan Pemerintah Nagari. Kemudian faktor penghambat BPRN dalam melaksanakan fungsi pengawasannya yaitu,kurang sarana dan prasarana,kurangnya sumber daya manusia di BPRN dan kurangnya komunikasi dan koordinasi antara Ketua BPRN dengan anggotanya, dimana hal ini disebabkan oleh kesibukan mereka masing-masing.

2. Konsep ideal menurut Ketua BPRN adalah melakukan pengumpulan aspirasi masyarakat sekali 3 bulan yang sebelumnya 6 bulan sekali,adanya mekanisme yang jelas atau panduan resmi dalam proses pengawanan dan keanggotaan BPRN Nagari Pambambahan harus sesuai dengan latar belakangnya.BPRN bersama Pemerintahan Nagari melaksanakan seminar atau pelatihan untuk mengoptimalkan pengawasan BPRN.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan, maka penulis memberikan beberapa saran yaitu :

1. Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari harus memiliki peran dan fungsi yang lebih dan mampu mendorong kelancaran dan kelangsungan pemerintah desa dan pembangunan Nagari. Selain itu, BPRN sangat perlu untuk tetap menjaga dan meningkatkan koordinasi antara sesama anggota Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari dengan Pemerintahan Nagari.
2. BPRN segera melaksanakan konsep ideal yang di anjurkan dan bekerja sama dengan Pemerintah Nagari.